

Danny Pomanto Mau bangun Gedung 8 Lantai Mirip MFC di Kantor Gabungan Dinas Urip Sumoharjo



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/04/16/danny-pomanto-mau-bangun-gedung-8-lantai-mirip-mgc-di-kantor-gabungan-dinas-urip-sumoharjo>

Walikota Makassar Danny Pomanto mewacanakan pembangunan gedung pemerintahan baru di kantor Gabungan Dinas, Jl Urip Sumoharjo.

Danny ingin mengklasifikasi kantor OPD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Usai meninjau Gedung Makassar Government Center (MGC) di Jl Hasanuddin, Danny mengatakan masih ada delapan OPD yang berkantor di luar.

Beberapa diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pemadam Kebakaran, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Hanya saja, untuk Dinas Damkar dan BPBD kata Danny tetap akan menempati kantornya sekarang ini. "Di gabungan dinas kita akan bangun 8 lantai gedung secanggih ini (MGC) juga. Untuk dinas-dinas yang perlu supporting besar, seperti perhubungan, sosial, PU, satpol PP, itu semua banyak. BPBD dan damkar ada tempatnya, tidak bisa diganggu," jelas Danny Selasa (16/4/2024).

Sementara untuk OPD pelayanan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PTSP akan berkantor di MGC.

OPD ini akan pindah berkantor ke MGC pasca peresmian pada Juli mendatang. Lalu OPD internal seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

(BPKAD), BKPSDMD, Bappeda, staf ahli, asisten, hingga seluruh bagian sekretariat daerah berpusat di Kantor Balai Kota Makassar.

Diketahui, beberapa OPD menyewa Mal GTC Jl Metro Tanjung Bunga sebagai tempat berkantor saat revitalisasi Kantor Balai Kota Makassar pada 2023.

Rencananya, pasca lebaran ini OPD tersebut akan kembali ke Kantor Balai Kota karena revitalisasi telah rampung. Sementara untuk bangunan-bangunan lama kata Danny akan diinventarisir dengan baik. Danny bercita-cita ingin membuat perpustakaan modern.

Perpustakaan modern ini kata Danny strategis ditempatkan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Jl Ap Pettarani.

Kemudian Kantor Dinas Pendidikan di Jl Anggrek akan disulap menjadi balai diklat. "Kita lagi mau rumuskan (kegunaan gedung lama) kita rencana rakor, saya punya rencana untuk bikin perpustakaan modern dengan gedung arsip modern di eks infokom, eks pendidikan jadi tempat diklat, ini jangan ada yang kosong," tuturnya.

Selain itu, Kota Parepare akan segera memiliki Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT). Saat ini proses pembangunan tengah berlangsung setelah resmi dimulai yang ditandai dengan penyerahan pekerjaan ke pelaksana pekerjaan/kontraktor pada Sabtu, 30 Maret 2024.

Hadir Kepala Kantor Kemenag Kota Parepare, Kasi PHU beserta Staf, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan Perencana, Pelaksana Pekerjaan dan Konsultan Pengawas.

Pada kesempatan tersebut, Kakan Kemenag ikut melakukan Pemeriksaan Bersama (Mutual Check - 0%) dalam rangka pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung PLHUT yang beralamat di Jl. Cendana, Kelurahan Bumi Harapan, Kota Parepare tersebut.

Sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yakni 150 hari kalender, maka Gedung PLHUT Kota Parepare akan selesai pada Agustus mendatang (28 Maret 2024 - 24 Agustus 2024). Dalam artian masyarakat akan segera menikmati layanan haji dan umrah di Gedung PLHUT yang baru pada September mendatang setelah diresmikan.

Doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Parepare khususnya warga Kemenag Kota Parepare tentunya sangat diharapkan. Kita tentunya sama-sama berharap pembangunan gedung PLHUT berjalan lancar dan selesai tepat waktu tanpa kendala apapun. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Kakan Kemenag Parepare, H. Fitriadi. "Sinergitas diperlukan

agar pekerjaan ini berjalan lancar seperti Pembangunan SBSN KUA Kec. Soreang,”ujarnya.

Hal tersebut juga senada dengan harapan yang disampaikan Kasi PHU, M. Hasyim Usman. “Semoga kegiatan pembangunan ini berjalan lancar dan bangunan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi peningkatan pelayanan terhadap jamaah haji dan masyarakat pada umumnya,”ujarnya.

Adapun sumber pendanaan pembangunan gedung berlantai 2 ini dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

Untuk diketahui, Sulsel telah memiliki 12 PLHUT hingga tahun 2023, sementara untuk tahun ini akan dibangun 5 PLHUT di lima kab/kota yakni Bantaeng, Sinjai, Selayar, Parepare dan Toraja Utara.

Sumber Berita :

1. <https://s Sulsel.kemenag.go.id/daerah/proses-pembangunan-dimulai-kota-parepare-akan-miliki-plhut-5cAuU> 4 April 2024.
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/04/16/danny-pomanto-mau-bangun-gedung-8-lantai-mirip-mgc-di-kantor-gabungan-dinas-urip-sumoharjo> 16 April 2024.

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf c. yang menyatakan:

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai